BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintah (Abdul Halim, 2007:23). Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007:23). Konsekuensi implementasi dari Otonomi Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabannya, termasuk di dalamnya pengamanan atas aset pemerintah daerah yang di biayai dengan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien (Abdul Halim, 2007:271).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008:2). Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Erlina Rasdianto, 2013:21). Secara khusus tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya (Erlina Rasdianto, 2013:21).

Ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.(Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo,2013). Menurut PSAP 01 paragraf 13, tanggung jawab penyusunan laporan keuangan berada pada pimpinan entitas, dalam pemerintah daerah yang dimaksud pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (Mursydi, 2013:63).

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010:9). Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (Erlina Rasdianto, 2013:23). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah di terima secara umum (Bastian, 2010:137). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinasnya (Deddi Nordiawan, 2009:25). Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2009:25).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Tujuan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi,

keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful* (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak (Doli D. Siregar, 2004:37), Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Doli D. Siregar, 2004:50) Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Laporan keuangan dalam sektor publik terbagi menjadi dua yaitu laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan oragnisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan atau posisi keuangan tersebut (Deddi, Ayuningtyas, 2014:129). Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas karena, informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2005 dalam Andra Kusuma, 2014)

Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur TI, seperti *hardware, software,* teknologi penyimpanan database, jaringan (*networking*) (Turban, *et.al.*2005:19). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public (Karmila dkk 2014).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012:30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan , Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip

akuntansi yang berlaku umum, Opini Tidak Memberi Pendapatan (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indra Bastian 2006:87).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, Kabupaten Bandung Barat masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya membenarkan hal itu dan menuturkan permasalahan masih di dominasi terkait asset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah Kab.Bandung Barat yang masih belum bersertifikat(Maman Sunjaya dalam PikiranRakyat.com 2017). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KBB Ludi Awaludin mengatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat mentargetkan bisa memiliki website sebagai upaya mewujudkan e-government di lingkup pemerintah daerah. Keberadaan website tersebut juga bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi yang memberikan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar memperbaiki kualitas laporan keuangan KBB yang menurun. (Ludi Awaludin dalam PikiranRakyat.com 2017). Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal seperti banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini disclaimer juga sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik (Arman Syifa, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016), yang melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peranan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hasilnya menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari (2014) juga menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul **"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap) Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan dapat di identifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil laporan keuangan yang maksimal.
2) Aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah masih belum bersertifikat.
3) Belum mengoptimalkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Seberapa besar pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari, mengumpulkan data-data dan mendapatkan informasi sebagai bahan dalam penelitian yang berkenaan dengan pengaruh standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan hal-hal yang ingin dicapai, sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuan penelitian biasanya diawali dengan kata-kata seperti: untuk mengetahui, menghitung, menganalisis, membedakan, dan lain-lain (W. Gede Merta, 2004, 11). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Standar Akuntansi Pemeritah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Hamidi (2007:6) – Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna tentang standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik, dan dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi yang

diterapkan dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti lain

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.